



Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis di Indonesia

Grets Janialdi Apner

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

gretsaldi@gmail.com

Abstract:

This article offers a reconstruction of political theology based on Augustine's civitas Dei and the presence of Christianity in public sphere. The main argument in this writing is that the construction of morality that responsible for preserves the plurality is a form of Christian presence and a concrete role of Christianity that is relevant and effective in practical politics in Indonesia. The Authors will do research on literature using theological approaches of political phenomena on civitas Dei and theology of Christian presence to get the construction of morality that builds the state. Based on all these discussions, I am convinced that Christianity can contribute significantly to the state by the building of morality that preserves the plurality of Indonesia society.

Keywords: *plurality; theology; politics; civitas dei*

Abstrak:

Artikel ini menawarkan sebuah rekonstruksi peran teologis-politik dari gereja di dalam politik praktis dengan menggunakan kritik Agustinus dalam *civitas Dei* dan konsep kehadiran Kristiani dalam ruang publik. Kekristenan di Indonesia memang tidak secara aktif terlibat dalam politik praktis, namun penulis berargumen bahwa peran kehadiran gereja dalam ruang publik politik melalui pembangunan moralitas yang bertanggung-jawab terhadap kemajemukan merupakan kehadiran Kristiani yang relevan dan efektif dalam politik praktis di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi politik dalam perspektif teologis dengan menelusuri pemikiran Agustinus dan teologi kehadiran Kristiani untuk mendapatkan usulan pembangunan spiritualitas serta moralitas yang membangun negara. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, penulis membutikan bahwa Kekristenan dapat berkontribusi besar terhadap negara melalui pembangunan moralitas berbangsa yang menjaga pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata kunci : kemajemukan; teologi; politik; civitas dei

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri dalam dan ditopang oleh kemajemukan. Hal tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan bukti sejarah mengenai keterlibatan berbagai identitas suku, agama, ras dan golongan yang dimiliki masyarakat telah berkontribusi aktif terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang ditujukan untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia menjadi materi yang



menegaskan kemajemukan sebagai identitas bersama dari negara ini. Namun, kemunculan pihak-pihak yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan politis dengan menggunakan identitas agama telah menjadi persoalan konkret yang mengganggu keamanan kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini semakin terasa pasca pasca pemilihan Presiden tahun 2014 yang semakin diperkeruh pada Pilkada DKI 2017 dengan kemunculan strategi-strategi politik identitas agama tertentu.¹ Mengacu kepada sejarah ketegangan hubungan antara agama dan politik praktis di Indonesia, direktur pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid menekankan pentingnya pencegahan politisasi agama, khususnya dalam Pemilu 2024 demi menghindari terpeliharanya radikalisme dan terorisme di Indonesia.²

Penulis menyadari bahwa hubungan antara agama dengan politik telah menjadi fenomenal sosial-politis yang dilematik. Secara khusus, gereja pun mengalami dilema dalam menentukan sikap mengenai hubungan dan pemahaman teologis mengenai hubungan antara agama (Kekristenan) dengan politik praktis. Pasca Pilkada DKI 2017 saja sudah terdapat beberapa penulis yang secara khusus berupaya membentuk pemahaman teologi-politik mengenai hubungan Kekristenan dengan politik praktis. Yohanes K. Susanta misalnya, melalui eksplorasi terhadap narasi perebutan kekuasaan kerajaan Israel yang dilakukan oleh Salomo dan Adonia berdasarkan 1 Raja-raja 1-2, membuat kesimpulan bahwa politik selayaknya dipahami sebagai media untuk memperjuangkan kasih dan mewujudkan keadilan bagi sesama.³ Kritik lainnya diberikan oleh Togardo Siburian terhadap sikap sejumlah gereja yang justru bermuara pada sikap terselubung dalam upaya memenangkan salah satu kandidat.⁴ Melalui kritik terhadap keterpisahan kualitatif yang tercipta dalam kehidupan manusia yang juga melibatkan agama di dalamnya, Edy Syahputra Sihombing pun menawarkan upaya pergeseran peranan agama sebagai *deep religion* (konsep yang diusulkan Ken Wilber) yang menumbuhkan kesadaran bersama.⁵ Melalui perbandingan dengan

¹ Sri Lestari, "Isu SAARA Meningkat di Pilkada DKI, Salah Siapa?" BBC Indonesia, 24 Maret 2017.

² Mediaindonesia, "Politisasi Agama Bisa Memicu Radikalisme dan Terorisme" Media Indonesia, 28 Juli 2022.

³ Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22.

⁴ Togardo Siburian, "Menilik Praktik Perpolitikan Kristen Kekinian: Refleksi PascaPilpres 2019," *Societas Dei* 6, no. 2 (2019):152.

⁵ Edy Syahputra Sihombing, "Pertumbuhan Kesadaran dalam Agama: Sebuah Tawaran," *Societas Dei* 6, no. 2 (2019): 207.



berbagai tulisan yang muncul pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, penulis menganggap bahwa tawaran kehadiran Kristiani yang relevan dan konstruktif dari Kekristenan di dalam politik praktis melalui pembangunan moralitas yang merawat kemajemukan merupakan hal baru dalam wacana teologi politik di Indonesia.

Ketidakjelasan sikap dan pemahaman teologi-politik yang seringkali justru tidak menjawab realitas publik di Indonesia merupakan indikasi bahwa tugas dan panggilan gereja, sebagai institusi umat Kristen, masih jauh dari kata efektif. Berdasarkan seluruh kegelisahan dan kritik terkait peran Kekristenan terhadap Indonesia dalam lingkup politik, penulis berupaya merekonstruksi teologi-politik dengan mendialogkan pemikiran Agustinus dengan konsep kehadiran Kristiani. Dimulai dengan pertanyaan, bagaimana Kekristenan di Indonesia dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan negara berdasarkan kondisi perpolitikan di negara ini? Penulis menganggap hal tersebut sebagai tugas reflektif dari gereja untuk menggumuli perannya dalam pembangunan negara, secara khusus melalui keterlibatan politis demi menjaga keamanan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Isu kemajemukan menjadi variabel dalam rekonstruksi teologi-politik dalam makalah ini. Mengapa demikian? Karena kemajemukan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat *taken for granted* tanpa adanya sikap kritis dalam pembentukan dan pemaknaannya. Natalie Goldstein dengan tegas menuliskan hubungan antara agama dengan negara merupakan proses yang tidak pernah muncul begitu saja, melainkan proses dinamis yang terus mengalami perubahan/perkembangan.⁶ Di tengah dinamika proses tersebutlah, agama memiliki peran yang sangat besar terhadap stabilitas keamanan dari kemajemukan sebuah masyarakat, secara khusus dalam konteks Indonesia.

Argumen utama yang penulis sampaikan melalui makalah ini adalah pembangunan moralitas yang bertanggung-jawab terhadap kemajemukan, yang direkonstruksi berdasarkan kritik Agustinus dalam *civitas Dei* dan teologi kehadiran Kristiani dalam ruang publik politis, merupakan langkah konkret Kekristenan sebagai agama yang membangun negara. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data pustaka melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, maupun sumber daring yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis kepustakaan.⁷ Penelitian ini akan dilakukan

⁶ Natalie Goldstein, *Religion and The State* (New York: Infobase Publishing, 2010), 3.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.



dengan cara memparkan pemikiran Agustinus dalam *civitas Dei* untuk menemukan kritik dan peranan agama dalam pembentukan moralitas yang membangun negara, serta penjelasan konsep ruang publik sebagai pewujudan moral. Agustinus melalui karyanya yang berjudul *de civitate Dei* atau City of God berupaya untuk mempertahankan kehadiran dan identitas Kekristenan dari anggapan yang menempatkan Kekristenan sebagai kambing hitam atas kejatuhan kekaisaran Romawi. Tulisannya tersebut dianggap sebagai sebuah karya teologi-politik yang secara serius mendialogkan hubungan antara agama dengan politik praktis (negara). Salah satu ide teologis yang muncul adalah terkait peran moralitas yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dua negara, yakni negara Allah atau negara Dunia (dikotomi konsep negara ideal dalam pemikiran Agustinus). Kritik Agustinus terkait peranan moralitas terhadap pembangunan sebuah negara menjadi penting untuk didialogkan dengan teologi kehadiran Kristiani sebagai bentuk pewujudan peran gereja dalam ruang publik di Indonesia, secara khusus dalam lingkup politik praktis. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung-jawab teologis-politis dari gereja sebagai unsur masyarakat Indonesia yang majemuk. Penulis akan menggunakan semua itu sebagai bagian analisis dan rekonstruksi teologi-politik yang membangun negara dengan moralitas yang merawat kemajemukan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, maupun sumber daring yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis kepustakaan.⁸ Penelitian ini akan dilakukan dengan mengulas sumber-sumber kepustakaan. Pada bagian awal, penulis akan mengulas pemikiran para penulis yang mengkritisi pemikiran Agustinus dalam *civitas Dei* untuk menemukan kritik dan peranan agama dalam pembentukan moralitas yang membangun negara. Kemudian, ulasan akan dilanjutkan terhadap tulisan-tulisan primer mengenai konsep ruang publik dan politik praktis sebagai ruang pewujudan moralitas. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data kepustakaan tersebut sebagai upaya merekonstruksi peran teologis-politis dari Kekristenan di Indonesia. Penulis menggunakan semua itu sebagai bagian analisis dan rekonstruksi teologi-politik yang membangun negara dengan moralitas yang merawat kemajemukan. Tulisan akan diakhiri dengan kesimpulan.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Moralitas dalam Civitas Dei

Civitas Dei merupakan sebuah karya yang sangat memengaruhi konsep hubungan antara agama, secara khusus Kekristenan, dengan negara dalam ruang politik praktis. Berbagai model berpikir untuk melandasi hubungan agama-negara telah dihasilkan melalui tulisan karya Agustinus tersebut. Berdasarkan signifikansi pengaruhnya terkiat landasan teologis dari hubungan agama-negara secara politis, penulis pun akan melakukan penelusuran terhadapnya untuk mendapatkan sebuah konsep yang dapat dipraktikkan oleh gereja dalam ruang politik di Indonesia.

Pembangunan Moral sebagai Kontribusi Agama Terhadap Negara

Di dalam karyanya yang berjudul *The City of God*, Agustinus dari Hippo melakukan respons terhadap tuduhan yang diberikan oleh orang-orang non-Kristen kepada Kekristenan sebagai penyebab jatuhnya kekaisaran Roma kepada bangsa Goth pada tahun 410.⁹ *City of God* atau *Civitas Dei* ditulis oleh Agustinus sejak 412 dan selesai pada tahun 427.¹⁰ Agustinus menegaskan bahwa dasar dari tulisannya tersebut adalah kemuliaan Allah yang memberikan nilai yang agung kepada manusia yang hanya didapatkan karena anugerah Ilahi bukan arogansi manusia.¹¹ Baginya kejatuhan kekaisaran Roma sudah terjadi jauh sebelum Kekristenan menjadi bagian dari kekaisaran Roma yang disebabkan rendahnya kekudusan hidup dan moralitas masyarakat Romawi. Keselamatan dan kejayaan yang dimiliki oleh bangsa Rowa selama ini merupakan anugerah Allah yang menganugerahkan kebahagiaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.¹² Agustinus memberikan sejumlah faktor rendahnya kekudusan dan moralitas hidup orang-orang Romawi, yaitu penyembahan kepada dewa-dewi berhala dan kehadiran para filsuf yang tidak memberikan dampak moral.¹³

⁹ Eugene TeSelle, *Augustine* (Nashville: Abingdon Press, 2006), 60.

¹⁰ J. H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 298.

¹¹ Marcus Dods, "The City of God by Augustine" dalam *Great Books of The Western World: Saint Augustine: The Confessions, the City of God, on Christian Doctrine*, peny. Mortimer J. Adler (London: Encyclopedia Britannica, 2003), 165.

¹² Rapar, *Filsafat Politik*, 299.

¹³ Dods, *The City of God*, 190.



Menurutnya, semua hal yang tidak mendatangkan peningkatan kekudusan dan moralitas manusia adalah ketidakadaan otoritas Ilahi dan digantikan oleh keadaan otoritas si jahat.

Penggunaan kata ‘kota’ (Eng. ‘City’; Lat. ‘Civitas’) dalam tulisan Agustinus tersebut merupakan semiotika yang menarik. Menurut Eugene TeSelle penggunaan kata *civitas* oleh Agustinus adalah hal yang wajar dan sesuai dengan penemuan para ahli politik yang berkesimpulan bahwa kata tersebut juga terdapat dalam tulisan-tulisan politik di kota Athena. TeSelle pun berpendapat bahwa tulisan Agustinus ini adalah sebuah upaya teori berpolitik oleh Agustinus yang berkaitan dengan teologi.¹⁴ Namun, Henry J. Schmandt justru berpendapat bahwa Agustinus melalui tulisannya tersebut tidak bermaksud untuk memperkenalkan sebuah teori politik, melainkan sebuah tulisan teologi yang berkaitan dengan kondisi politik pada masa itu.¹⁵

Menurut TeSelle, Agustinus melalui *Civitas Dei* ingin menegaskan bahwa kota Tuhan yang pertama dan paling baik sudah ada di surga, yang dihuni-Nya melalui pengetahuan dan kasih.¹⁶ Berdasarkan kerangka berpikir itulah Agustinus juga ingin memperkenalkan sebuah pemaknaan terhadap ‘kota’ yang ideal, yakni kota yang tidak terbuat dari batu dan semen tetapi dari pikiran yang jelas dan kemauan yang keras.¹⁷ Bagi Schmandt, ‘*Civitas Dei*’ oleh Agustinus merupakan sebuah konsep teologis yang mendikotomikan tentang dua kekuatan besar yang saling bersaing di dalam jiwa manusia, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Keduanya diibaratkan sebagai dua kota yang saling bertarung, kota kebaikan yang dipimpin oleh Allah dengan kota kejahatan yang dipimpin oleh setan.¹⁸ Kaitan antara *Civitas Dei* dengan kejatuhan kekaisaran Romawi adalah manusia berperan serta untuk meningkatkan negaranya yang juga berdasarkan kualitas moral serta spiritual rakyat yang hidup di dalamnya.¹⁹ Hal tersebut berdasarkan realitas kehancuran, tindakan penghancuran, kekerasan yang kacau-balau, mutilasi dan pembunuhan yang telah semakin membuktikan runtuhnya moralitas manusia pada saat itu.²⁰

¹⁴ TeSelle, *Augustine*, 61.

¹⁵ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 152.

¹⁶ TeSelle, *Augustine*, 61.

¹⁷ *Ibid.*, 61.

¹⁸ Schmandt, *Filsafat Politik*, 153.

¹⁹ *Ibid.*, 157.

²⁰ C. W. McPherson, “Augustine Our Contemporary” *Cross Currents*, no.4 (Spring/Summer): 172.



Dua kota tersebut disimbolisasi melalui dua nama kota yang juga ada di dalam Alkitab, yaitu kota Babilon dan kota Yerusalem. Dua kota tersebut digunakan oleh Agustinus sebagai simbolisasi *Civitas* Deinya berdasarkan kisah Kain dan Habel. Babilon adalah simbol kota kejahatan atau kota duniawi yang ‘didirikan’ oleh Kain, sedangkan Yerusalem adalah simbol kota kebaikan atau kota surgawi yang dihuni oleh Habel.²¹ Pada dasarnya setiap manusia terlahir dalam garis keturunan Kain sehingga menjadikan kita sebagai warga kota Babilon, namun hal tersebut bukan bersifat permanen karena ada kemungkinan bagi manusia untuk terlahir kembali sebagai warga Yerusalem. Orang-orang yang telah menjadi warga Yerusalem menurut Agustinus telah menjadi pendatang di dunia ini. Status kewargaan orang-orang tersebut telah berubah dari warga Babilon, kota duniawi menjadi warga Yerusalem, kota surgawi, kota kebaikan. Namun, mereka masih hidup dan berada di dunia ini sehingga menjadikan mereka sebagai pendatang di dunia.

Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hal baik dan jahat ada di lokasi yang sama, yaitu dunia. Agustinus pun mengingatkan bahwa kebaikan dan kejahatan itu tidak ditemukan dalam bentuk yang nyata, melainkan bersifat karakter spiritual yang ada di dalam manusia sekaligus menjadikan manusia berada di antara keduanya.²² Keduanya akan bertemu dan menjadi konflik spiritual yang muncul di tengah-tengah semua komunitas yang ada dan setiap pribadi. Karakter spiritual tersebut dapat diketahui melalui tanda-tanda, seperti Alkitab. Baginya tanda-tanda inilah yang menjadi pokok pertumbuhan karakter spiritual yang membangun atau justru menghancurkan manusia, termasuk Alkitab apabila disalahartikan. Penyalahgunaan itu juga yang terjadi terhadap tanda-tanda di dalam agama para kaum non-Kristen yang menurut Agustinus telah menjadi ‘kendaraan’ Iblis untuk mendatangkan kejahatan sehingga menghasilkan kejatuhan kekaisaran Romawi ke bangsa Goth.²³

Bagi Agustinus Ideologi politik yang ada di sebuah negara juga dapat menjadi kendaraan kejahatan yang mendatangkan kebohongan dan kesadaran yang salah. Terkait hubungan antara gereja dengan negara Eric Grefory pun menemukan persoalan yang sama

²¹ TeSelle, *Augustine*, 62.

²² *Ibid.*, 63.

²³ *Ibid.*, 63.



dari Agustinus bahwa tidak ada politik yang dapat menyelamatkan manusia.²⁴ Namun, dia juga mendukung keberadaan kekaisaran Kristen, yang menurutnya, pada masa sebelumnya para Rasul tidak mencari dukungan dari para Kaisar karena kekaisaran melawan Kekristenan.²⁵ Berdasarkan hal tersebut sebenarnya kita sudah melihat adanya ideologi yang sangat politis dari pemikiran Agustinus, yang pada satu sisi seolah menolak ideologi politik negara, namun di sisi lain juga ikut terlibat mendukung politisasi agama. *Civitas Dei* Agustinus telah muncul sebagai tulisan teologis-politis yang berkembang dalam gereja Barat dan mempengaruhi perkembangan hubungan gereja dengan negara.

TeSelle berpendapat bahwa pemikiran Agustinus dalam perkembangannya telah mempengaruhi negara-negara Barat yang melakukan pembedaan antara gereja dengan negara yang dibuktikan melalui kemunculan kata ‘negara sekular’.²⁶ Negara sekular muncul sebagai penegasan orientasi negara yang tidak berlandaskan aliran agama tertentu namun tetap menjamin keberadaan agama. Meskipun hal tersebut tidak menjadi jaminan tidak ada kelompok-kelompok militan agama tertentu yang berusaha untuk mempolitisasi agama.²⁷ Agustinus pun tidak menampik kemunculan politisasi agama yang dapat menjadi awal kemunculan perang ideologi sekaligus perang spiritual antara yang baik dan jahat. Hal tersebut akan menimbulkan masalah karena kekuatan-kekuatan tersebut telah mencapai perwujudan nyata melalui ekspresi-ekspresi politik.

J. H. Rapar menilai *civitas Dei* memperlihatkan sebuah filosofi politik bernegara yang idealis, secara spesifik kondisi ‘negara ilahi’ Agustinus merupakan sebuah keberadaan negara ideal sama seperti yang dicetuskan oleh Plato.²⁸ Penyebutan negara sekuler berdasarkan pemikiran Agustinus pun berkonotasi pesimis terhadap perpolitikan praksis di negara. Negara sekuler terbentuk karena penyelewengan dari negara ilahi dan menjadikan cinta-diri sebagai landasan bernegaranya.²⁹ Hal tersebut telah mendorong kemunculan konflik-konflik kepentingan para warga negara sekuler tersebut. Selain itu, muncul juga benturan nilai antara warga ‘pendatang’ yang membawa kepentingan negara ilahi di dalam

²⁴ Eric Gregory, *Christianity, Democracy, and The Shadow of Constantine* (New York: Fordham University Press, 2017), 99.

²⁵ TeSelle, *Augustine*, 64.

²⁶ *Ibid.*, 65.

²⁷ *Ibid.*, 65.

²⁸ Rapar, *Filsafat Politik*, 304.

²⁹ *Ibid.*, 307.



negara sekuler dengan nilai-nilai warga negara sekuler. Agustinus pun memberikan ide yang dapat diimplementasikan tentang kehadiran warga pendatang di negara sekuler. Jeffrey S. Metcalfe menemukan bahwa harapan adalah kunci untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan kebaikan sebagai objek usahanya.³⁰ Harapan itu dibutuhkan oleh dunia ini karena menurut Agustinus seluruh manusia adalah rusak dan cenderung kikir.³¹ Hal itu akan semakin menyulitkan kehadiran kebaikan.

Moralitas yang Menyelamatkan

Pemikiran dan kritik Agustinus mengenai pentingnya membangun kebudayaan manusia (masyarakat) dengan kebajikan/watak baik (Ing. *Virtue*) yang muncul dalam *civitas Dei* memang terkesan ekstrem dan utopis. Bonnie Kent misalnya, menyadari bahwa pendikotomian yang dilakukan Agustinus terkesan terlalu tajam sehingga manusia seolah-olah terbagi dalam dua ras, yakni mereka yang membangun *earthly city* yang akan selalu berusaha mendapatkan kekuasaan dari manusia lainnya dan mereka yang membangun *heavenly city* yang lebih mencintai Allah dan bersimpuh pada kekuasaan-Nya.³² Nuansa utopis dalam dikotomi tersebut memang sangat kuat terasa. Padahal, berdasarkan kenyataannya, manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi dikotomi tersebut. Penulis menyadari bahwa manusia dengan segala keterbatasan pemikiran, kemampuan memahami, dan pengendalian diri selalu berada dalam upaya di antara kedua dikotomi yang dibuat Agustinus tersebut.

Posisi manusia, termasuk dalam hal ini umat Kristen, yang berada dalam ‘letak antara’ tidak menghilangkan peluang dalam pembangunan kehidupan atau kebudayaan atau negara. Justru, pada letak antara itulah manusia memiliki kesempatan untuk terus-menerus memperaharui diri maupun memenuhi kapasitas moralnya. Inilah yang mewujud dalam buku 15 pada *civitas Dei* ketika Agustinus menggunakan Mazmur 17:2 untuk mendefinisikan *virtue*, “*A brief and true definition of virtue is rightly ordered love*”.³³ Itulah sebabnya, penulis menyadari bahwa pembentukan moralitas yang tepat akan berpengaruh

³⁰ Jeffrey S. Metcalfe, “Hoping Without a Future: Augustine’s City of God” *Journal of Theological Interpretation*, no.5 (Februari 2013): 239.

³¹ *Ibid.*, 239.

³² Bonnie Kent, “Reinventing Augustine’s Ethics: The Afterlife of City of God” dalam *Augustine’s City of God: A Critical Guide*, peny. James Wetzel (Cambridge: Cambridge University, 2012), 225.

³³ *Ibid.*, 225.



besar dalam upaya pembangunan negara. Apabila dikusi ini dilekatkan kepada koteks Indonesia sebagai negara demokratis yang majemuk, maka pembangunan moralitas perlu memperhatikan kemajemukan sebagai unsur vital dalam masyarakat Indonesia.

Hal mendasar, yang menurut penulis, perlu dibentuk adalah kesadaran terhadap pentingnya moralitas yang menyelamatkan. Keadaran tersebut perlu merasuk dari dalam nurani sebagai kendali moral pribadi yang ada dalam setiap individu manusia.³⁴ Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan upaya mencintai atau yang disebut Agustinus sebagai *virtue*. Alfensius Alwino menjabarkan empat kategori mencintai dalam pemikiran Agustinus, yakni: pertama, kepada Tuhan; kedua, kepada diri sendiri; ketiga, kepada yang setara dengan diri sendiri; dan keempat, kepada yang berada di bawahnya.³⁵ Melalui pemahaman yang bercorak hierarkis, Agustinus membagi cinta kepada Tuhan sebagai yang paling utama dan cinta kepada diri sendiri, jikalau berlebihan, akan menutup orientasi cinta tersebut dari ketiga subjek yang lain. Itulah sebabnya, seseorang yang mencintai diri sendiri secara berlebihan akan menutup diri dari kepekaan atau solidaritas.³⁶ Padahal, kepekaan atau solidaritas merupakan unsur vital dalam upaya memenuhi nurani dengan kesadaran akan pentingnya membentuk moralitas yang menyelamatkan.

Teks Lukas 10:27, “*Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.*” merupakan ringkasan pemikiran Agustinus mengenai bentuk ideal dari arus cinta seorang manusia. Inilah yang juga muncul dalam *civitas Dei* ketika Agustinus menganggap kota Allah dibangun di atas cinta (yang ideal tersebut), sedangkan kota dunia (Lat. *Civitas terrena*) dibangun di atas cinta dan berorientasi pada pemuliaan diri sendiri.³⁷ Agustinus pun membatasi dialektik di antara keduanya, yaitu agama tidak mencari kekuasaan politik dan intervensi politik tidak mencampuri wilayah keimanan. Meski demikian, penulis menganggap bahwa konsep ideal mengenai cinta tersebut dapat menjadi modal untuk membentuk moralitas yang menyelamatkan, yang akan sangat berguna bagi seorang manusia (baca: seorang Kristen)

³⁴ Dvid Little, “Conscientious Individualism: A Christian Perspective on Ethical Pluralism” dalam *Christian Political Ethics*, peny. John A. Coleman (Princeton: Princeton University Press, 2008): 113.

³⁵ Alfensius Alwino, “Memahami Konsep Kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes” *Melintas* 34, no. 3 (2018):234.

³⁶ *Ibid.*, 235.

³⁷ *Ibid.*, 237.



dalam menjalani hidup & membentuk kebudayaan/masyarakat/negara yang harmonis dalam keberagaman.

Ruang Publik dan Politik Sebagai Arena Perwujudan Moralitas

Melacak Konsep Ruang Publik

Ruang publik merupakan konsep Barat yang kemudian mulai ramai diperbincangkan dalam lingkup akademisi di Indonesia, mulai dari lingkup politik hingga teologi. Oleh sebab itu, sebagai upaya memahami konsep ruang publik diperlukan penelusuran terhadap kemunculan konsep ‘publik’ dan ‘privat’ yang dimulai pada era Yunani kuno hingga abad modern. Pada masa kemunculan *polis*, yaitu ‘negara kota’ Yunani terciptalah distingsi antara ‘privat’ (Yun. *Idios* – privat, particular) dan ‘publik’ (Yun. *Demosios* – milik umum, milik negara).³⁸ Manusia modern perlu menyadari perbedaan yang muncul dalam era *polis* Yunani kuno dengan era modern. Pada era kristianisme misalnya, secara khusus melalui peran Agustinus, mulai terciptalah konsep “diri” yang personal, individual, dan bertanggung-jawab hanya kepada “penciptanya”. Sedangkan, Setyo Wibowo menegaskan bahwa pada era *polis* Yunani kuno seorang individu tidak dapat eksis tanpa kolektivitas di mana dia hidup yang menuntutnya untuk berpartisipasi atau menjadi bagian dari keluarganya, polis-nya dan kosmos-nya.³⁹ Kemudian, konsep ruang publik pun berbeda sejak Jurgen Habermas melekatkan konsep tersebut pada masyarakat borjuis pada abad-18. Baginya, ruang publik merupakan ‘ruang tengah’ yang menjembatani antara negara (ruang politik) dengan rakyat /keluarga (ruang privat-domestik) dan menjadi ruang universal bagi setiap kelompok untuk berdiskusi serta menentukan kebijakan/keputusan sebagai partisipasi politik di jalankan.⁴⁰

Pada era *polis* Yunani kuno, agama dianggap sebagai bagian dari *polis* dan bukannya masuk ke dalam ruang privat. Meskipun sejak Agustinus menghasilkan *civitas Dei* yang mengisyaratkan perbedaan di antara keimanan dan politik, namun di dalam perkembangan kebudayaan manusia, secara khusus berdasarkan pemikiran Habermas, agama justru berpotensi memengaruhi kondisi ruang publik di era pos-sekular. Menurutnya, agama memiliki potensi untuk menjawab perosalan kebudayaan manusia pos-sekular yang

³⁸ A. Setyo Wibowo. “Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno” dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 24.

³⁹ *Ibid.*, 25.

⁴⁰ *Ibid.*, 26.



menampilkan penurunan solidaritas dikarenakan sikap pementingan diri atau kelompok masing-masing.⁴¹ Agama merupakan pandangan hidup (*Weltanschauungen*), bukan sekadar sistem nilai (*Wertsysteme*) yang berisikan modal kognitif dan kekuatan motivasi yang tidak dimiliki oleh pandangan tentang kehidupan yang profan.⁴²

Terkait keberadaan dan peran agama dalam ruang publik, Habermas tetap mempertahankan netralitas agama, yang menurut penulis, sangat berguna bagi peningkatan solidaritas masyarakat plural. Menurut Habermas, sebagai kritik terhadap Nicholas Wolterstorff yang menganggap agama dapat hadir dalam politik dengan menggunakan bahasa-bahasa religiusnya, agama perlu membuat batasan untuk tidak menggunakan kuasa negara (politik) sebagai alat kelompok agama (-mayoritas) yang akan mewujud dengan sifat koersif. Kondisi ini, tentu saja tidak cocok dan tidak akan relevan dalam sebuah ruang publik yang majemuk, misalnya Indonesia.

Melalui pemikiran Habermas itu pula lah, penulis menyadari bahwa kehadiran agama dalam ruang publik tidak perlu dianggap sinis atau pun tabu sejauh ia berkontribusi dalam pembentukan moralitas, sebuah pandangan hidup yang memengaruhi tiap individu di dalamnya untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama atau dalam semangat solidaritas publik. Ini juga berarti, politik praktis sebagai salah satu bagian dalam ruang publik merupakan arena yang dapat digunakan untuk mewujudkan moralitas yang dibangun oleh Kekristenan. Partisipasi moralitas dari Kekristenan semacam itu pun akan terwujud ketika dijalankan dengan nurani yang dipenuhi kepekaan cinta terhadap sesama.

Agama, dalam hal ini Kekristenan melalui gereja, perlu terus-menerus membentuk dirinya sebagai unsur yang menolong umat untuk menghadirkan dirinya dalam ruang publik dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Kristiani. Menurut Mervyn Davies dan Graham Dodds negara dapat menampilkan beragam masalah dan realitas yang memunculkan pertanyaan teologis untuk gereja.⁴³ Pertanyaan teologis itu muncul berdasarkan realitas di dalam negara yang membutuhkan respons dari gereja-gereja. Respons konkret gereja adalah melalui pembentukan sudut pandang umat Kristen dalam memahami

⁴¹ A. Sunarko. "Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas" dalam *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 225.

⁴² *Ibid.*, 227.

⁴³ Mervyn Davies dan Graham Dodds, *Leadership in The Church for The People of God* (London: T&T Clark, 2011), 4.



dan memaknai gaya hidup bermasyarakat yang ada di negara tersebut. Gereja perlu mempersiapkan umat di dalamnya untuk menghadapi realitas sesuai konteks agar mampu bertanggung-jawab dalam pembangunan bangsa. Salah satu realitas yang diangkat dalam rancangan penelitian ini adalah tentang krisis semangat kemajemukan di Indonesia.

Hal yang menjadi masalah adalah ketika gereja justru gagal membentuk sudut pandang umat Kristen untuk memaknai gaya hidup bermasyarakat yang ada di negara tersebut. Di dalam konteks Indonesia, hal ini pun muncul dalam tulisan Ayub Ranoh yang menjelaskan bahwa setelah tahun 1950an muncul pemikiran-pemikiran teologis-politis ekumenis yang menjadi dasar keterlibatan gereja dan orang Kristen dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.⁴⁴ Artinya, gereja di Indonesia membutuhkan teologi politiknya untuk mempersiapkan diri dan umatnya menghadapi perkembangan politik dari masa ke masa.

Tanggung-Jawab Terkait Kemajemukan dalam Politik di Indonesia

Tulisan Eka Darmaputera menunjukkan bahwa teologi politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Allah pun, berdasarkan tulisan Juergen Moltmann dalam *on Human Dignity*, bukanlah Allah yang apolitis, Dia selalu memihak untuk melawan ketidakadilan dan manusia pun diciptakan dengan hakikat politis.⁴⁵ Oleh sebab itu, menurut Darmaputera, tidak ada teologi yang apolitis. Berteologi secara apolitis adalah berteologi dan berpolitik yang salah dan bodoh.⁴⁶ Dia pun memberikan kritik kepada dua sikap ekstrim mengenai hubungan antara agama dan politik. Sikap pertama adalah pemisahan mutlak agama dari politik yang menurutnya hanya menjadikan agama (gereja) justru hanya formalitas dan ritual sehingga tidak fungsional.⁴⁷ Kritik ini sebenarnya sudah muncul dalam pertemuan IMC di Tambaran yang memberikan peringatan terhadap potensi sikap pasif dari gereja dalam hubungannya dengan negara yang dianggap justru semakin melemahkan misi gereja. Sikap kedua yang dikritik oleh Darmaputera adalah hubungan yang tidak sehat antara agama dengan negara, entah itu dalam rupa peng'agama'an politik maupun pem'politik'an agama.⁴⁸

⁴⁴ Ayub Ranoh, "Kristen dan Politik di Indonesia: Refleksi Historis" dalam *Teologi Politik: Agama - agama Kekuasaan*, peny. Einar M. Sitompul (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009), 129.

⁴⁵ Eka Darmaputera, "Teologi Politik" dalam *Yesus & Politik: Sebuah Bunga Rampai*, peny. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie A. A. Lempas (Jakarta: Komunitas NISITA, 2004), 3.

⁴⁶ *Ibid.*, 4.

⁴⁷ *Ibid.*, 4.

⁴⁸ *Ibid.*, 5.



Teologi politik menurut Darmaputera tidak berarti mencampuradukkan agama dan politik, justru teologi politik mendorong gereja untuk konsisten melaksanakan fungsi kritisnya dengan melandaskan sikapnya di bawah terang penghakiman kerajaan Allah.⁴⁹ Albertus Patty berpendapat bahwa agama dapat menjadi katalisator dalam proses demokratisasi di Indonesia yang dapat terwujud apabila relasi di antara agama dengan negara bersifat kritis, murni dan tidak menjadi sarana politik kelompok elit tertentu.⁵⁰ Bahkan menurut Patty panggilan teologis sekaligus politis gereja dalam situasi politik Indonesia kontemporer adalah berpartisipasi menjadi aktor utama proses demokratisasi.⁵¹ penulisnya, fakta yang dia temukan justru keterlibatan gereja, secara khusus umat Kristen dalam perjuangan, kegiatan maupun kelompok-kelompok penjunjung demokrasi kontemporer di Indonesia ini justru masih sangat minim. Menurutnya, umat Kristen semestinya terlibat aktif di dalam perjuangan-kelompok tersebut. Keterlibatan secara aktif dari umat Kristen dalam perjuangan-kelompok demokrasi sesungguhnya membantu gereja untuk keluar dari mental korban yang hanya membuat gereja memfokuskan perhatiannya kepada penderitaan yang ia alami.⁵² Hal ini sangat berpotensi membuat gereja justru menjadi pasif untuk melaksanakan misinya yang mengubah, membebaskan atau berdasarkan bahasa Eka Darmaputera adalah berteologi yang salah dan bodoh.

Pendapat Patty dan kritik Darmaputera tersebut dapat kita jadikan bahan refleksi terhadap kondisi politik Indonesia masa sekarang, khususnya pasca Pilkada DKI yang sudah dipenuhi oleh politik identitas dan berpotensi mengganggu keamanan kemajemukan bangsa. Politik identitas yang semakin marak dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan politik sekalangan elit politik di negeri ini sudah tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh gereja. Melainkan, gereja perlu memberikan perhatian lebih kepada kondisi tersebut. Gereja pasti akan menemukan beragam masalah dan tantangan. Masalahnya adalah politik identitas yang muncul sekarang telah menyudutkan identitas-identitas tertentu bahkan menimbulkan gangguan keamanan serta kenyamanan hidup berkomunitas secara khusus beragama di beberapa daerah. Tantangannya adalah gereja perlu membebaskan dirinya untuk keluar dari

⁴⁹ *Ibid.*, 5.

⁵⁰ Patty, *Kristen dan Situasi Politik*, 115.

⁵¹ *Ibid.*, 119.

⁵² *Ibid.*, 121.



mental korban agar mampu memberikan perhatian kepada kondisi di sekitar gereja, dalam hal ini kemajemukan bangsa Indonesia.

Neil J. Ormerod dan Shane Clifton juga menegaskan bahwa kemajemukan merupakan salah satu realitas utama yang menuntut gereja untuk memberikan respons yang tepat terhadap setiap konflik yang muncul dan mampu mewujudkan keharmonisan di dalam kemajemukan tersebut.⁵³ Gereja, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, telah hidup dan menjadi bagian dari kemajemukan. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembentukan identitas misional yang akan ditampilkan oleh gereja termasuk yang ada di Indonesia, secara khusus untuk menghadapi kemajemukan beragama. Pembentukan identitas misional gereja di Indonesia ditujukan untuk merespons secara teologis-politis terhadap perpolitikan identitas di Indonesia yang telah menjadi ancaman bagi keamanan kemajemukan bangsa.

Itulah sebabnya, cara gereja merefleksikan relasinya dengan negara perlu memperhatikan identitas-identitas tersebut demi terciptanya sebuah karya teologis, dalam hal ini misi gereja yang koheren dengan perkembangan termasuk politik bangsa. Apalagi identitas yang cukup melekat pada gereja di Indonesia adalah agama yang berada di bawah bayang-bayang kolonial. Oleh sebab itu, gereja perlu terus menunjukkan keberadaannya sebagai unsur negara yang juga memperdulikan serta memberikan kontribusi aktif bagi negara, salah satunya dengan cara merawat dan merayakan kemajemukan bangsa.

Merayakan Kemajemukan Sebagai Peran Nyata Gereja Yang Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia

Kritik yang diberikan oleh Agustinus mengenai politik yang dianggap sebagai kendaraan kejahatan dan semakin menjauhkan manusia dari *city of God* dapat kita gunakan sebagai bahan refleksi teologis-politis, secara khusus terhadap konteks Indonesia masa sekarang. Tulisan Agustinus dalam *city of God* juga dapat gereja maknai sebagai pilihan semangat dan karakter spiritual yang ingin ditampilkan dalam dunia ini. Dia sendiri di dalam karyanya menegaskan bahwa kejatuhan Roma adalah akibat buruknya moralitas para kaum negara duniawi yang menjalankan negaranya dengan nilai-nilai yang menjauh dari kebaikan. Oleh sebab itu, kehadiran agama di dalam sebuah negara dapat terlibat secara langsung

⁵³ Neil J. Ormerod dan Shane Clifton, *Globalization and The Mission of The Church* (New York: T&T Clark, 2009), 7.



dengan memberikan peningkatan moralitas para umatnya yang juga adalah warga negara tertentu. Hal ini berarti agama-agama yang ada di Indonesia dapat menunjukkan keberadaannya melalui pengaruh peningkatan moralitas bernegara dan berbangsa para umatnya yang juga adalah warga negara Indonesia.

Hal tersebut juga berlaku bagi Kekristenan di Indonesia. Bagi penulis keberadaan gereja hanya dapat dibuktikan apabila dirinya mampu menunjukkan pengaruh positifnya terhadap keutuhan negara, bukannya justru semakin menarik diri dari beragam kegiatan kebangsaan. penulis juga mengkritik sikap banyak gereja yang cenderung enggan untuk terlibat dalam beragam isu-isu sosial dan kebangsaan, seolah-olah gereja ini bukanlah bagian dari negara Indonesia. Pemikiran Agustinus tidak dapat diimplementasikan sepihak, seolah-olah gereja dan seluruh umat di dalamnya adalah ‘warga pendatang’ yang asalnya adalah dari *city of God*. Gereja sudah tidak dapat lagi mempertahankan keterpisahan dirinya yang semakin melemahkan tingkat tanggung-jawabnya terhadap negara. Apabila jarak antara gereja dengan negara semakin luas, artinya gereja semakin tidak bisa memberikan dampak nyata terhadap negara tersebut. Padahal, salah satu implementasi dari pemikiran Agustinus adalah mengenai nilai-nilai *city of God* itu menjadi harapan di tengah dunia yang semakin terpuruk. Apalagi umat Kristen bagi Agustinus adalah kaum yang disokong oleh cinta dan pengharapan yang.⁵⁴

Indonesia pun membutuhkan harapan pada saat ini, secara khusus terkait kondisi ancaman terhadap kemajemukan yang semakin nyata akibat kemunculan pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan identitas agamanya sebagai ‘payung identitas’ bangsa yang justru menghancurkan partikularitas dari setiap identitas yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan oleh seluruh unsur negara, dalam hal ini oleh gereja-gereja, karena isu ini merupakan tanggung-jawab historis-moral terkait kemerdekaan bangsa. Negara ini dibentuk di atas kemajemukan dan berjuang untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, sudah sepatutnyalah seluruh unsur yang ada di dalam negara ini berjuang untuk mempertahankan kemajemukan. Kebisuan hanya menjadi pendukung pasif terhadap pihak-pihak yang ingin menghancurkan kemajemukan bangsa.

⁵⁴ Matthew Levering, “Linear and Participatory History: Augustine’s City of God.” Dalam *Journal of Theological Interpretation* no.5 (Februari 2011): 179.



Artinya, gereja perlu memberikan sikap nyata, secara khusus melalui sikap yang teologis-politis.

Perhatian yang diberikan oleh gereja terhadap kondisi perpolitikan di negara ini juga dapat sangat berdampak pada kesiapan para umat Kristen yang akan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau aktif dalam partai politik. Maksudnya, gereja melalui pembangunan moralitas umatnya dapat mempersiapkan para kader-kader politik Indonesia yang siap melakukan pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa. Togardo Siburian pun memberikan pendapat bahwa seorang politisi yang telah berhasil mendapatkan jabatan politik setelah bertarung dalam pesata demokrasi selayaknya menyadari bahwa dirinya adalah seorang negarawan yang bertugas untuk mengayomi semua golongan.⁵⁵ Bagi Siburian sikap negarawan itulah yang telah hilang dari banyak aktor politik di Indonesia sehingga menimbulkan perpecahan pasca pesta demokrasi. Siburian menyadari bahwa politik membutuhkan pembangunan moralitas demi kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi sang penguasa atau aktor politik. Inilah peran yang paling nyata yang menurut penulis dapat gereja lakukan bagi negara Indonesia.

Negara tidak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kendaraan kekuatan kejahatan sehingga menjauhkan gereja darinya. Siburian meyakini bahwa negara pun mendapatkan kuasanya dari Allah sehingga membuat gereja juga memiliki tanggung-jawab moral untuk menghormati institusi tersebut.⁵⁶ Pemenuhan tanggung-jawab moral tersebut sangat berdampak untuk meminimalisir para umat Kristen terhasut dan termanipulasi oleh gerakan-gerakan politik-radikal dan anarkis yang dapat membahayakan keutuhan negara.⁵⁷ T. A. Deshi Ramadhani menuliskan bahwa pergulatan politik di Indonesia khususnya pada era awal memasuki masa demokrasi telah menemui dilematikan kekuasaan dan keadilan seperti yang ia temukan dalam Mazmur 72.⁵⁸ Maksudnya, pesta demokrasi dapat menjadi sarana pengumpulan suara yang dapat memperjuangkan keadilan atau justru malah menjadi kendaraan mencapai kekuasaan politik saja. W. B. Selbie juga menegaskan bahwa hubungan antara agama dengan negara juga perlu ditingkatkan sebagai pengimplementasian

⁵⁵ Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Relfeksi Etis Kristiani” *Societas Dei: Journal Agama dan Masyarakat*, no. 1 (April 2017): 65.

⁵⁶ *Ibid.*, 66.

⁵⁷ *Ibid.*, 67.

⁵⁸ T. A. Deshi Ramadhani “Kekuasaan atau Keadilan” *Forum Biblika: Jurnal Ilmiah Populer*, no.21 (2017): 19.



perkembangannya.⁵⁹ Hal tersebut berdasarkan kesadaran bahwa esensi utama dari agama bukanlah pada dogma, pengakuan iman atau bentuk ibadahnya melainkan pada bagaimana agama itu menjadi hidup di dalam ruangan yang berkembang.⁶⁰

Membentuk kehadiran Kristiani dalam politik praktis dengan cara merawat dan merayakan kemajemukan juga telah menuntut gereja memiliki landasan teologi misi yang tidak eksklusif. Samuel Benyamin Hakh berpendapat bahwa gereja perlu mengakui dan menyadari bahwa dirinya tidak dapat membelenggu serta membatasi kehadiran Allah hanya secara eksklusif di dalam Kekristenan⁶¹. Allah yang *omnipresence* berarti kuasa dan kehadiran-Nya dapat mewujudkan dalam berbagai unsur, termasuk di tengah keberagaman itu sendiri. Di dalam kerangka kehadiran Kristiani, Miroslav Volf pun berpandangan bahwa Kekristenan, dalam hal ini gereja, perlu menyadari kehadirannya di tengah keberagaman bukan berfokus pada usaha untuk mempersaingkan keselamatan, melainkan pada usaha untuk memahami identitas dirinya dalam relasi dengan identitas-identitas yang lain.⁶² Itulah mengapa, Hakh memahami pelayanan misi Yesus pada dasarnya bersifat komprehensif sehingga penyampaian injil perlu dilakukan secara utuh dan menyeluruh untuk menyentuh setiap kebutuhan manusia di berbagai aspek kehidupan yakni sosial, hukum, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dsb.⁶³ Bahkan, gereja-gereja di Indonesia perlu menyadari bahwa pengalaman dan realitas kemajemukan yang ada di negara ini merupakan faktor yang berharga untuk membentuk pandangan teologi dan pelayanan misi yang relevan serta komprehensif, misalnya sebuah misiologi majemuk yang berfokus dalam usaha-usaha memperjuangkan dan menjaga kemajemukan sebagai karya penyelamatan Allah bagi Indonesia.⁶⁴

Gereja butuh mengaktualisasikan dirinya dalam pelayanan-pelayanan sosial yang ada di dalam negara. Salah satu bentuk pelayanan sosial tersebut dapat diwujudkan dalam

⁵⁹ W. B. Selbie, "Church Efficiency" *The Biblical World* no.5 (November 1917): 312.

⁶⁰ *Ibid.*, 312.

⁶¹ Samuel Benyamin Hakh, *Merangkai Kehidupan Bersama yang Pluralis dan Rukun: Suatu Pendekatan Biblis Kontekstual* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan BPK Gunung Mulia, 2017), 19.

⁶² Miroslav Volf, "Johannine Dualism and Contemporary Pluralism" dalam *The Gospel of John and Christian Theology*, Richard Bauckham & Carl Mosser, peny. (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2008), 36.

⁶³ Hakh, *Merangkai Kehidupan Bersama*, 25.

⁶⁴ Grets Janialdi Apner, "Kehadiran Gereja dalam Kemajemukan Indonesia dalam Terang Yesaya 49:6 dan Matius 28:19" *Jurnal Teologi* 7 no. 2 (November 2018), 195.



keterlibatan politis yang menghadirkan kesejahteraan bagi orang banyak, bukan bagi kepentingan partai atau elit politik tertentu. Gereja dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap realitas, secara khusus dalam negara, untuk mempersiapkan respons yang dapat mempersingkapkan karya kasih Allah.⁶⁵ Gereja-gereja di Indonesia pun mendapatkan kesempatannya untuk mewujudkan hal tersebut melalui keterlibatannya yang bersifat teologis-politis dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Salah satu upaya konkret yang dapat gereja lakukan adalah pembentukan kesiapan para umat yang akan terlibat aktif dalam ruang politik praktis di Indonesia. Para individu tersebut perlu diperlengkapi dengan kesadaran misional, pemahaman teologis dan kepekaan politis yang bertanggung-jawab secara moral di hadapan Allah. Hal ini menjadi langkah yang sangat relevan untuk dilakukan di tengah konteks Indonesia yang majemuk karena moralitas merupakan bahasa universal yang dapat diterima oleh siapa pun. Artinya, apabila para individu Kristiani yang terlibat aktif dalam politik praktis mampu memberikan kehadiran yang membangun moralitas bangsa melalui berbagai kebijakan publik yang dibuat, maka pada saat itu nilai-nilai iman Kristen dapat mewujudkan di dalam ruang publik di Indonesia. Pada akhirnya, merekalah yang akan memberikan keterlibatan nilai-nilai Kristiani di dalam politik praktis di Indonesia, secara khusus untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang majemuk ini.

KESIMPULAN

Hubungan agama-negara merupakan sesuatu yang idealnya dibangun diatas sikap kritis dan konsep berpikir yang relevan. Agustinus melalui *civitas Dei* pun telah memberikan bahan dasar bagi gereja untuk membentuk teologi-politik yang praktis untuk dikembangkan dalam relasi & kontribusinya terhadap negara. Melalui artikel ini, penulis sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa agama, dalam hal ini Kekristenan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perpolitikan di Indonesia yang majemuk. Kontribusi yang dimaksud adalah melalui pembangunan moralitas berbangsa yang menghargai kemajemukan di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mewujudkan melalui kehadiran umat Kristen sebagai subjek konkret dari Kekristenan yang juga merupakan salah satu agama yang ada di negara Indonesia. Artinya, gereja sebagai lembaga agama Kristen memiliki tugas dan

⁶⁵ Katherine Chambers, "Slavery and Domination as Political Ideas in Augustine's City of God" *The Heythrop Journal* (2013): 19.



tanggungjawabnya sebagai agen teologis sekaligus politis terhadap negara ini. Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk dapat dipertimbangkan sebagai langkah konkret mewujudkan Kekristenan yang membangun moralitas bangsa yang menjaga kemajemukan Indonesia: Pertama, gereja sebagai lembaga agama Kristen perlu menyadari bahwa ia adalah agen teologis sekaligus politis sebagai pewujudan karakter profetisnya; Kedua, gereja perlu membuka dirinya terhadap persoalan-persoalan politik di negara ini; Ketiga, gereja perlu mempersiapkan umat Kristen dengan memberikan landasan berpikir secara teologis yang memungkinkan mereka untuk peka dan merespons persoalan-persoalan politik yang menyerang kemajemukan masyarakat Indonesia; Keempat, umat Kristen perlu menyadari bahwa menjaga stabilitas politik, secara khusus kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan bagian dari pewujudan keimanannya kepada Kristus, Sang Penyelamat dunia.

KEPUSTAKAAN

- Alwino, Alfensius. “Memahami Konsep Kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes” *Melintas* 6, no. 3 (Agustus 2018):233-247.
- Apner, Grets Janialdi. “Kehadiran Gereja dalam Kemajemukan Indonesia” *Jurnal Teologi* 7, no. 2 (November 2018): 185-196.
- Chambers, Katherine. “Slavery and Domination as Political Ideas in Augustine’s City of God” *The Heythrop Journal*, no. 54 (2013): 13-28.
- Darmaputera, Eka. “Teologi politik” Dalam *Yesus & politik: Sebuah bunga rampai*, peny. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie A. A. Lempas. Jakarta: Komunitas NISITA, 2004.
- Davies, Mervyn dan Graham Dodds. *Leadership in the church for the people of hope*. London: T&T Clark, 2011.
- Dods, Marcus. “The City of God by Augustine” Dalam *Great Books of The Western World: Saint Augustine: The Confessions, The City of God, on Christian Doctrine*, peny. Mortimer J. Adler. London: encyclopedia Britanica, 2003.
- Gregory, Eric. *Christianity, Democracy, and The Shadow of Constantine*. New York: Fordham University Press, 2017.
- Hakh, Samuel Benyamin. *Merangkai Kehidupan Bersama Yang Pluralis dan Rukun: Suatu Pendekatan Biblis Kontekstual*. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta & BPK Gunung Mulia, 2017.



- Lestari, Sri. 2017. “Isu SARA Meningkatkan di Pilkada DKI Jakarta, Salah Siapa?” BBC Indonesia, 24 Maret 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353>
- Levering, Matthew. “Linear and Participatory History: Augustine’s City of God” *Journal of Theological Interpretation*, no. 5 (Februari 2011): 175-196.
- McPherson, C. W. “Augustine Our Contemporary” Dalam *Cross Currents*, no. 4 (Spring/Summer 2000): 170-173.
- Mediaindonesia, 2022. “Politisasi Agama Bisa Memicu Radikalisme dan Terorisme” Media Indonesia, 4 Juni 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/497004/politisasi-agama-bisa-picu-radikalisme-dan-terorisme>
- Metcalf, Jeffrey S. “Hoping Without a Future: Augustine’s Theological Virtues Beyond Melancholia” *The anglican theological review*, no. 1 (Juli 2013): 235-250.
- Patty, Albertus. “Kristen dan situasi politik: Indonesia kontemporer” Dalam *Teologi politik: Agama-agama kekuasaan*, peny. Einar M. Sitompul. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2004.
- Ramadhani, T. A. Deshi. “Kekuasaan atau keadilan” Dalam *Forum Biblika: Jurnal Ilmiah Populer*, no. 21 (2007): 11-22.
- Ranoh, Ayub. “Kristen dan Politik di Indonesia: Refleksi Historis” Dalam *Teologi Politik: Agama-agama Kekuasaan*, peny. Einar M. Sitompul. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Selbie, W. B. “Church Efficiency” *The Biblical World*, no. 5 (November 1917): 312-314.
- Siburian, Togardo. “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, no. 1 (April 2017): 64-93.
- _____. “Menilik Praktik Perpolitikan Kristen Kekinian: Refleksi PascaPilpres 2019” *Societas Dei* 6, no. 2 (Oktober 2019): 152-167.
- Sihombing, Edy Syahputra. “Pertumbuhan Kesadaran dalam Agama: Sebuah Tawaran,” *Societas Dei* 6, no. 2 (2019): 192-208.



- Sunarko, A. “Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas” dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 219-240.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1(Oktober 2019): 22-36.
- TeSelle, Eugene. *Augustine*. Nashville: Abingdon Press, 2006.
- Volf, Miroslav. “Johannine Dualism and Contemporary Pluralism” dalam *The Gospel of John and Christian Theology*, peny. Richard Bauckham & Carl Mosser. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2008.
- Wibowo, AA. Setyo. “Kepublikan da Keprivaatan di Dalam Polis Yunani Kuno” dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 23-61.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.